

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jl. Ki Penjawi No. 12 Salatiga Kode Pos 50714

Telp/fax. (0298) 313492



TELAH DI PERIKSA	
PPK DISPERNAKER KOTA SALATIGA	
TANGGAL : 28	MAY 2025
PARAF :	

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 02/PPK.Sembako/IV/2025

Tanggal : 23 April 2025

Pekerjaan:

**BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT (BANTUAN SEMBAKO BAGI PEKERJA RENTAN
MAYDAY)**

Tahun Anggaran : 2025
Sumber Dana : APBD Kota Salatiga
Masa : 7 (Tujuh) hari kalender
Nilai : Rp. 99.339.250,00
Nama Pelaksana : CV. WITA POINT



CV. WITA POINT

Jl. Brigjend Sudiarto II Rt 1 Rw 6 Kel. Kalicacing, Sidomukti, Salatiga



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Ki Penjawi Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp. (0298) 313492
Faks. (0298) 313492 Situs <http://disperinnaker.salatiga.go.id>
Surat elektronik disperinnaker@salatiga.go.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA
	NOMOR SURAT PERINTAH KERJA : 02/PPK.Sembako/IV/2025
	TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA 23 APRIL 2025
Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak:	SUSANTO ADI WIBOWO, S.T.,M.T.
Nama Penyedia:	CV. WITA POINT
PAKET PENGADAAN : BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (BANTUAN SEMBAKO BAGI PEKERJA RENTAN MAYDAY)	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/PP.Sembako/IV/2025
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 16 April 2025
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 05/PP.Sembako/IV/2025
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 22 APRIL 2025
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA/DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 99.339.250,00,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)	
Jenis Kontrak: Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Pejabat Penandatanganan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia CV. WITA POINT
 SUSANTO ADI WIBOWO, S.T.,M.T. NIP. 19671211 199903 1 005	 LAELA ULYANINGRUM Direktur

TELAH DI PERIKSA
PPK DISPERNAKER KOTA SALATIGA
TANGGAL : 28 MAY 2025
DRAF :



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Ki Penjawi Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp. (0298) 313492
Faks. (0298) 313492 Situs <http://disperinnaker.salatiga.go.id>
Surat elektronik disperinnaker@salatiga.go.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA
	NOMOR SURAT PERINTAH KERJA : 02/PPK.Sembako/IV/2025
	TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA : 23 APRIL 2025
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	SUSANTO ADI WIBOWO, S.T.,M.T.
Nama Penyedia:	CV. WITA POINT
PAKET PENGADAAN : BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (BANTUAN SEMBAKO BAGI PEKERJA RENTAN MAYDAY)	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/PP.Sembako/IV/2025
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 16 April 2025
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 05/PP.Sembako/IV/2025
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 22 APRIL 2025
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA/DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 99.339.250,00,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)	
Jenis Kontrak: Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Pejabat Penandatangan Kontrak  SUSANTO ADI WIBOWO, S.T.,M.T. NIP. 19671211 199903 1 005	Untuk dan atas nama Penyedia CV. WITA POINT  LAELA ULYANINGRUM Direktur

TELAH DI PERIKSA
PPK DISPERNAKER KOTA SALATIGA
TANGGAL : 28 MAY 2025
PARAF :



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jl. Ki Penjawi Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp. (0298) 313492
Faks. (0298) 313492 Situs <http://disperinnaker.salatiga.go.id>
Surat elektronik disperinnaker@salatiga.go.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA
	NOMOR SURAT PERINTAH KERJA : 02/PPK.Sembako/IV/2025
	TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA : 23 APRIL 2025
Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak:	SUSANTO ADI WIBOWO, S.T.,M.T.
Nama Penyedia:	CV. WITA POINT
PAKET PENGADAAN : BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (BANTUAN SEMBAKO BAGI PEKERJA RENTAN MAYDAY)	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/PP.Sembako/IV/2025
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 16 April 2025
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 05/PP.Sembako/IV/2025
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 22 APRIL 2025
<p>SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA/DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota</p>	
<p>Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 99.339.250,00,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)</p>	
<p>Jenis Kontrak: Harga Satuan</p>	
<p>WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender</p>	
<p>Untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Pejabat Penandatanganan Kontrak</p>  <p>SUSANTO ADI WIBOWO, S.T.,M.T. NIP. 19671211 199903 1 005</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia CV. WITA POINT</p>  <p>LAELA ULYANINGRUM Direktur</p>

TELAH DI PERIKSA
PPK DISPERNAKER KOTA SALATIGA
TANGGAL : 28 MAY 2025
PARAF :



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Ki Penjawi Nomor 12 Salatiga Kode Pos 50714 Telp. (0298) 313492
Faks. (0298) 313492 Situs <http://disperinnaker.salatiga.go.id>
Surat elektronik disperinnaker@salatiga.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SALATIGA
	NOMOR SURAT PERINTAH KERJA : 02/PPK.Sembako/IV/2025
	TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA : 23 APRIL 2025
Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak:	SUSANTO ADI WIBOWO, S.T.,M.T.
Nama Penyedia:	CV. WITA POINT
PAKET PENGADAAN : BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (BANTUAN SEMBAKO BAGI PEKERJA RENTAN MAYDAY)	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 02/PP.Sembako/IV/2025
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 16 April 2025
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 05/PP.Sembako/IV/2025
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 22 APRIL 2025
SUMBER DANA: dibebankan atas DIPA/DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu Daerah Kabupaten/Kota	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 99.339.250,00,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)	
Jenis Kontrak: Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (tujuh) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga Pejabat Penandatanganan Kontrak  SUSANTO ADI WIBOWO, S.T.,M.T. NIP. 19671211 199903 1 005	Untuk dan atas nama Penyedia CV. WITA POINT  LAELA ULYANINGRUM Direktur

TELAH DI PERIKSA
PPK DISPERNAKER KOTA SALATIGA
TANGGAL : 28, MAY 2025.....
PARAF :

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatanganan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
- 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.

c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

c. Laporan harian berisi:

- 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
- 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
- 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
- 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
- 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatanganan Kontrak.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatanganan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

TELAH DI PERIKSA
PPK DISPERNAKER KOTA SALATIGA
TANGGAL : 28 MAY 2025
PARAF :

- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi... maka... Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

TANGGAL : 28 MAY 2025

PARAF

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatanganan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan ~~[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]~~;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

TELAH DI PERIKSA	
PPK DISPERNAKER KOTA SALATIGA	
TANGGAL :	28 MAY 2025
PARAF :	

LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA

BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (BANTUAN SEMBAKO BAGI PEKERJA RENTAN MAYDAY)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
Belanja Paket Doorprise Mayday					
1	Beras @ 5kg	500	zak/paket	81.700,00	40.850.000,00
2	Gula Pasir @1kg	1000	kg/paket	20.000,00	20.000.000,00
3	Minyak goreng kemasan 2 liter	500	pouch/paket	43.000,00	21.500.000,00
4	Mie Instan isi 5 buah	500	bendel/ paket	18.500,00	9.250.000,00
5	Goodie bag	500	buah/paket	7.850,00	3.925.000,00
Total I					95.525.000,00
JUMLAH BIAYA KENA PAJAK NON SEMBAKO					34.675.000,00
PPN NON SEMBAKO 11%					3.814.250,00
JUMLAH TOTAL					99.339.250,00

Penyedia,
CV. WITA POINT



Wita Point

LAELA ULYANINGRUM
Direktur

TELAH DI PERIKSA	
PPK DISPERSIAKOTASALATIGA	
TANGGAL :	28 MAY 2025
PARAF :